

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---

NOTA DINAS

NOMOR: ~~272~~ /D.8.ND/11/2017

NOMOR: ~~250~~ /D.3.ND/11/2017

Kepada Yth. : Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas  
Dari : 1. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan  
2. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam  
Hal : Laporan Pelaksanaan Pertemuan *the 6<sup>th</sup> Session of the Assembly and 10<sup>th</sup> Session of the Council of GGGI* di Addis Ababa, Ethiopia  
Lampiran : -  
Tanggal : ~~3~~ November 2017

---

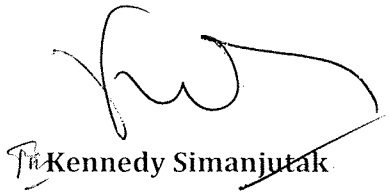
Sehubungan dengan pelaksanaan pertemuan *Global Green Growth Week 2017 (GGGW)* dan *the 6<sup>th</sup> Session of the Assembly and 10<sup>th</sup> Session of the Council of Global Green Growth Institute (GGGI)* di Addis Ababa, Ethiopia, pada tanggal 17–20 Oktober 2017 bersama ini dengan hormat kami laporkan kepada Bapak Menteri sebagai berikut:

1. GGGW adalah program *flagship* GGGI yang diselenggarakan setiap tahun dan merupakan pertemuan antar pemangku kepentingan (pemerintah, pihak swasta, dan *civil society*) yang mendiskusikan *platform green growth* untuk mendapatkan solusi yang inovatif untuk mencapai pertumbuhan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan secara global. Dalam pertemuan GGGW 2017 terdapat berbagai sesi yang mendiskusikan kebijakan dan pembiayaan untuk pertumbuhan hijau serta gambaran ke depan mengenai pembangunan hijau.
2. Dalam rangkaian kegiatan GGGW 2017 turut diselenggarakan pertemuan *the 6<sup>th</sup> Session of the Assembly and 10<sup>th</sup> Session of the Council of GGGI* yang dihadiri oleh delegasi negara-negara anggota GGGI, dengan 7 (tujuh) agenda utama, yaitu: (1) *Report of the Management and Program Sub-Committee (MPSC)*; (2) *Update on Bankable Projects and National Financing Vehicles*; (3) *Independent Evaluation Report*; (4) *Refreshed Strategic Plan 2015-2020 and Resource Mobilization*; (5) *Reformed Work Program and Budget*; (6) *Approval of the Revised Staff Regulations and Rules*; dan (7) *Effective and Inclusive Governance Organs*.
3. Sebagai salah satu *founding member* dan *contributing member* GGGI, Pemerintah Republik Indonesia (RI) turut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan GGGW dan pertemuan *Joint Session of the Assembly and Council of GGGI*. Dalam kesempatan tersebut Delegasi Pemerintah Republik Indonesia (Delri) diwakili oleh Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan dan Kasubdit Pengembangan dan Konservasi Energi dari Kementerian PPN/Bappenas yang merupakan *focal point* kerja sama Pemerintah RI dan GGGI. Selain itu, anggota Delri juga terlibat pada dua sesi GGGW yaitu Sesi *Green Climate Fund* oleh Kepala Subbidang Pendanaan Pembiayaan Perubahan Iklim Lainnya Kementerian Keuangan dan Sesi *Green Growth Index* oleh Kepala Seksi Statistik Lingkungan Badan Pusat Statistik. Beberapa hal pokok yang disampaikan Delri pada *Joint Session Assembly and Council* adalah sebagai berikut:

- a) Pentingnya untuk merujuk pada prioritas nasional dan konteks lokal masing-masing negara dalam menyusun program dan kegiatan kerja sama dengan GGGI untuk meningkatkan efektivitas dan kepemilikan (*ownership*) terhadap program, kegiatan, dan termasuk *earmark funding* dari negara donor, seperti Norwegia.
  - b) Mewujudkan kegiatan konkrit GGGI dalam bentuk *bankable project* dan *national financing vehicles* yang berwawasan hijau di Indonesia. Saat ini terdapat 24 proyek yang difasilitasi GGGI, dan 10 diantaranya dalam proses mendapatkan pembiayaan pihak swasta, serta 2 diantaranya berada di Indonesia. Proyek pertama adalah ***Island Solutions for Indonesia*** yang mengembangkan model bisnis komersial senilai 15 juta USD untuk pulau terpencil di NTT. GGGI telah melaksanakan penilaian teknis dan finansial secara mendetail, *project structuring*, dan mendukung penyiapan regulasi yang diperlukan dalam rangka investasi swasta pada proyek pembangkit hibrid antara diesel dan *solar photovoltaic (PV)* tersebut. Untuk proyek kedua, ***Indonesia Solar Photovoltaic PV for Special Economic Zones*** di Mandalika, GGGI berkolaborasi dengan PT. SMI dan *Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)* mengembangkan pembangkit tenaga surya berkapasitas awal 10 MW yang nantinya dapat dikembangkan hingga 100 MW. Proyek senilai 12-15 juta USD ini akan menjadikan Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus pertama dengan sumber energi terbarukan.
4. Tim Delri Bappenas berkesempatan melakukan pertemuan bilateral dengan Direktur Jenderal GGGI, Dr. Frank Rijsberman, pada 19 Oktober 2017. Pertemuan ini membahas antara lain: (a) komitmen kontribusi RI yang akan berakhir tahun ini; (b) kemajuan proses penyusunan *Host Country Agreement (HCA)*; (c) fokus dan pendekatan pelaksanaan program kerja sama *green growth* di Indonesia; (d) peluang kerja sama antar negara anggota GGGI; (e) rencana *engagement* dengan OECD; dan (f) inisiatif *New Climate Economy (NCE)*. Pada pertemuan ini, Dirjen GGGI menekankan pentingnya peran Indonesia di dalam organisasi GGGI baik dalam hal kontribusi maupun program. GGGI berkomitmen akan mengalokasikan pendanaan yang lebih fleksibel untuk program di Indonesia untuk periode mendatang. Sementara Pihak Delri menyampaikan agar GGGI dapat memainkan perannya dalam *leveraging* kerja sama pembangunan untuk membuka kesempatan pembiayaan pembangunan yang lebih luas melalui pelibatan pihak swasta.
  5. Berdasarkan rangkaian pertemuan selama 4 hari di Addis Ababa, terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan Kementerian PPN/Bappenas ke depannya sebagai berikut:
    - a) Melakukan reviu kerjasama Pemerintah RI dengan GGGI sebagai dasar dalam menentukan berlanjut atau tidaknya kontribusi finansial RI;
    - b) Mendorong percepatan proses penyelesaian HCA, termasuk ratifikasinya;
    - c) Mereviu dokumen revisi *Reformed Work Program and Budget* yang akan disampaikan Sekretariat dan menyampaikan persetujuan secara tertulis paling lambat sebelum pertemuan MPSC pada bulan April 2018;
    - d) Menyampaikan pencalonan untuk anggota *Council GGGI* dari *Expert and Non-State Actors* dari Indonesia selambat-lambatnya pada akhir Desember 2017;
    - e) Konsolidasi pelaksanaan program *green growth* di Indonesia, terutama untuk memfokuskan kegiatan sesuai dengan *Country Planning Framework 2016-2020* dan *Green Growth Phase II Program Document*; dan
    - f) Mempersiapkan partisipasi Delri dalam pertemuan *the 7<sup>th</sup> Session of the Assembly and The 11<sup>th</sup> Session of the Council* pada bulan Oktober 2018 di Seoul, Korea Selatan.

Bersama ini terlampir dengan hormat disampaikan kepada Bapak Menteri detail laporan pelaksanaan pertemuan yang dimaksud, mohon kiranya arahan dari Bapak Menteri terhadap beberapa tindak lanjut yang diperlukan di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak Menteri diucapkan terima kasih.



**Kennedy Simanjutak**



**Arifin Rudiyanto**

Tembusan Yth.:

1. Sdr. Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas
2. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan
3. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral
4. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan

## Laporan Pelaksanaan Pertemuan the 6<sup>th</sup> Session of The Assembly and 10<sup>th</sup> Session of the Council of GGGI di Addis Ababa, Ethiopia, 17-20 Oktober 2017

---

### I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan dan Kasubdit Pengembangan dan Konservasi Energi telah menghadiri *Global Green Growth Week 2017* (GGGW) yang diselenggarakan pada tanggal 17-20 Oktober 2017 di United Nations Conference Center, Addis Ababa, Ethiopia. Acara ini diselenggarakan oleh GGGI bekerja sama dengan Pemerintah Ethiopia.

GGGW adalah program *flagship* GGGI yang diselenggarakan setiap tahun dan merupakan pertemuan antar pemangku kepentingan (pemerintah, pihak swasta, dan *civil society*) yang mendiskusikan *platform green growth* untuk mendapatkan solusi yang inovatif untuk mencapai pertumbuhan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan secara global. Dalam pertemuan tersebut terdapat berbagai sesi yang mendiskusikan kebijakan dan pembiayaan untuk pertumbuhan hijau serta gambaran ke depan mengenai pembangunan hijau.

Pada rangkaian GGGW tersebut, Delegasi Pemerintah Republik Indonesia (Delri) dari Kementerian PPN/Bappenas diwakili oleh Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan dan Kasubdit Pengembangan dan Konservasi Energi dari Kementerian PPN/Bappenas yang merupakan *focal point* kerja sama Pemerintah RI dan GGGI, turut hadir dalam pertemuan *The 6<sup>th</sup> Session of The Assembly and 10<sup>th</sup> Session of the Council of GGGI* dan pertemuan bilateral dengan Direktur Jenderal GGGI, Dr. Frank Rijsberman, pada 19 Oktober 2017. Selain itu, anggota Delri juga menjadi pembicara pada dua sesi GGGW yaitu Sesi *Green Climate Fund* oleh Kepala Subbidang Pendanaan Pembiayaan Perubahan Iklim Lainnya Kementerian Keuangan dan Sesi *Green Growth Index* oleh Kepala Seksi Statistik Lingkungan Badan Pusat Statistik.

### II. PELAKSANAAN PERTEMUAN

#### A. *Joint Session of The Assembly and Council of GGGI*

Pertemuan dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perubahan Iklim Ethiopia, Dr. Gemedo Dalle, sebagai Pelaksana Tugas *Chair of the Council* dan diikuti delegasi negara-negara anggota GGGI dan *observer* dari negara-negara calon anggota dan organisasi internasional lainnya. Pertemuan memiliki 7 (tujuh) mata agenda utama sebagai berikut: (1) *Report of the Management and Program Sub-Committee (MPSC)*; (2) *Update on Bankable Projects and National Financing Vehicles*; (3) *Independent Evaluation Report*; (4) *Refreshed Strategic Plan 2015-2020 and Resource Mobilization*; (5) *Reformed Work Program and Budget*; (6) *Approval of the Revised Staff Regulations and Rules*; dan (7) *Effective and Inclusive Governance Organs*. Agenda 5, 6, dan 7 dibahas terbatas hanya untuk negara-negara anggota. Beberapa hal pokok dalam pertemuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertemuan diawali dengan **Laporan Kemajuan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal GGGI, Dr. Frank Rijsberman**. Dalam setahun terakhir, GGGI telah membantu 10 negara mitra dalam menyusun 14 kebijakan, peta jalan, dan strategi sektoral. Selain itu, GGGI juga telah membantu mengembangkan beberapa *bankable projects*, termasuk di Indonesia. Dilaporkan pula mengenai perkembangan ekspansi keanggotaan terutama untuk negara-negara berkembang dan *least developed countries* (LDCs). Terkait dengan laporan ini, kami menyampaikan pentingnya untuk merujuk pada prioritas nasional dan konteks lokal masing-

masing negara dalam menyusun program dan kegiatan kerja sama dengan GGGI untuk meningkatkan efektivitas dan kepemilikan (*ownership*) terhadap program dan kegiatan tersebut. Selain itu, kami menekankan pentingnya GGGI untuk dapat mewujudkan kegiatan yang konkrit dalam bentuk *bankable project* yang berwawasan hijau di Indonesia. Kami sampaikan pula bahwa saat ini Pemerintah RI sedang dalam proses penyelesaian kontribusi tahun ketiga, sesuai dengan komitmen yang telah diberikan sebelumnya (2015-2017).

2. Pada agenda pembahasan ***Report of the Management and Program Sub-Committee***, peserta pertemuan menyetujui usulan pengembangan sistem pelaporan "*traffic light*" terhadap kemajuan penyiapan proyek-proyek yang *bankable* oleh GGGI. Topik lain yang menjadi pokok pembahasan adalah kemitraan dengan sektor swasta. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang memandatkan keterlibatan sektor swasta dalam pelaksanaan maupun pembiayaan (*financing*) kegiatan.
3. Agenda ***Update on Bankable Projects and National Financing Vehicles*** membahas kemajuan dan refleksi dalam mempromosikan investasi dan pembiayaan hijau (*green financing*). Saat ini ada 24 proyek yang tengah difasilitasi oleh GGGI, 10 diantaranya dalam proses untuk mendapatkan pembiayaan pihak swasta dan 2 diantaranya ada di Indonesia, yaitu ***Island Solutions for Indonesia*** (pengembangan pembangkit hibrid antara diesel dan *solar photovoltaic (PV)* di pulau terpencil di NTT) dan ***Indonesia Solar PV for Special Economic Zones in Mandalika***. Secara umum, berdasarkan pengalaman GGGI dalam dua tahun terakhir mengembangkan proyek-proyek ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya:
  - a. Tidak semua proyek merupakan *bankable project* dan tidak ada satu tahapan yang berlaku untuk membuat semua proyek menjadi *bankable*;
  - b. Masih diperlukannya struktur pembiayaan yang mengkombinasikan pembiayaan publik dan swasta, terutama untuk proyek-proyek yang memerlukan pendanaan publik untuk menurunkan level risiko investasi hingga ke level yang dapat diterima investor; dan
  - c. Diperlukannya lebih banyak kegiatan yang difokuskan pada instrumen kebijakan terkait dengan efektivitas fasilitasi dalam membuat *bankable projects*.
4. Agenda ***Independent Evaluation Report*** mendiskusikan hasil dan rekomendasi dari evaluasi independen yang telah dilakukan terhadap organisasi GGGI pada aspek Kinerja Program, Pengembangan Institusional, dan Rencana Strategis. Beberapa rekomendasi yang penting diantaranya adalah:
  - a. GGGI harus mencari terobosan untuk mendapatkan pengakuan (*recognition*) yang lebih baik dalam kontribusinya terhadap pengembangan *green growth*;
  - b. Upaya ekspansi keanggotaan dan program harus berdasarkan keseimbangan rasional antara sumberdaya yang tersedia, kontribusi negara-negara anggota, dan kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
  - c. GGGI harus bermitra dengan organisasi lain yang mengakui nilai tambah dan keunggulan komparatifnya.

Delegasi negara-negara anggota mengapresiasi upaya evaluasi ini dan meminta Sekretariat untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan. Secara khusus, kami menyampaikan perlunya GGGI untuk mulai membangun visi dan rencana strategis jangka panjang, mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan, dengan mengantisipasi perkembangan negara-negara anggota terkait isu-isu politik dalam negeri negara-negara anggota.

5. Agenda ***Refreshed Strategic Plan 2015-2020*** menyoroti strategi yang diusulkan untuk menetapkan *outcome* strategis yang baru dan lebih tajam serta relevan dengan program *green growth* di negara-negara anggota dan mitra. Selain itu, di dalam rencana strategis tersebut juga didefinisikan *core values* organisasi GGGI dan upaya untuk menstabilkan 'ukuran' organisasi, program, dan kegiatannya. Hal ini terkait dengan subagenda ***Resource Mobilization*** yang menegaskan strategi sumber pendanaan dan skenario pembiayaan. Sesuai *Establishment Agreement of GGGI*, negara anggota diharapkan mendukung GGGI dan stabilitas finansialnya melalui kontribusi sukarela tahunan sebagai *core funding*. Saat ini, 8 negara anggota, termasuk Indonesia, telah berkontribusi untuk pendanaan organisasi dengan hanya satu kontribusi yang merupakan *earmark funding*. Skenario pembiayaan jangka menengah disusun berdasarkan 3 skenario yaitu sesuai target di dalam *Refreshed Strategic Plan 2015-2020* (pertumbuhan tinggi), pertumbuhan rendah, dan pertumbuhan menengah. Untuk agenda ini, anggota *Council of GGGI* menyatakan persetujuannya dengan catatan perlu ditingkatnya komunikasi antara Sekretariat dengan negara anggota dalam pelaksanaan program sehingga sumberdaya non-finansial yang dimiliki oleh negara-negara anggota, antara lain pengalaman dan keahlian, dapat diberdayakan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan program-program tersebut.
6. Agenda ***Reformed Work Program and Budget*** membahas 4 area reformasi program dan anggaran yaitu: (1) Pendekatan dalam mengalokasikan anggaran program; (2) Standar kualitas dan proses persetujuan program baru; (3) Alokasi internal dan manajemen pegawai; dan (4) Transparansi dan akuntabilitas pada penyusunan program dan kegiatan. Terhadap usulan ini terdapat banyak masukan dari anggota *Council* diantaranya adalah: (1) agenda reformasi yang disampaikan terlalu teoretis dan sulit dipahami di tataran praktisnya; (2) harus ada sistem transisi khusus dalam masa peralihan dari sistem penganggaran yang lama ke sistem baru; (3) perlu dialokasikannya waktu yang cukup untuk *country team* dan *focal point* di masing-masing negara program untuk menyusun dan mengusulkan *resource envelope*; dan (4) tetap diperlukannya prioritas terhadap *programmatic funding* berdasarkan *Country Planning Framework* yang telah disepakati. Persetujuan untuk agenda ini ditunda. Revisi dokumen berdasarkan masukan anggota *Council* akan disampaikan melalui surat elektronik dan persetujuan disampaikan secara tertulis paling lambat sebelum pertemuan MPSC pada bulan April 2018.
7. Pada ***Approval of the Revised Staff Regulations and Rules*** disampaikan beberapa perubahan utama pada *Staff Regulation* yaitu definisi '*staff*' diperluas untuk juga mencakup pegawai yang dikontrak melalui UNOPS (*United Nations Office for Project Services*), beberapa definisi dan detail *expatriate allowances* dan *other benefits* dipindahkan ke *Staff Rules*, dan beberapa perubahan di bagian *Salaries and Allowances* untuk menyesuaikan dengan *host country agreement* (HCA). Revisi *Staff Regulation and Rules* ini disetujui oleh negara-negara anggota.
8. Pada agenda ***Effective and Inclusive Governance Organs***, peserta pertemuan menyetujui pencalonan Norwegia dan Inggris untuk menjadi anggota *Council GGGI* periode 2018-2019 mewakili *contributing member* menggantikan Denmark dan Norway yang berakhir keanggotaannya pada tahun 2017. Selain itu, *acting Chair of GGGI* juga mengundang negara-negara anggota untuk mengusulkan anggota *Council* dari *Expert and Non-State Actor* yang saat ini dua dari lima posisi keanggotaannya masih kosong. Usulan tersebut disampaikan paling lambat akhir tahun 2017 ini untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Sekretariat. Dengan demikian anggota *Council GGGI* saat ini adalah Australia, Indonesia, Norwegia, UAE, dan Inggris mewakili *Contributing Members*; Costa Rica, Ethiopia, Jordan, Senegal, dan Rwanda mewakili *Participating Members*; Mr. Mark Watts (*C40 Cities Climate Leadership Group*), Dr. Hoesung Lee (*Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC*), dan Ms. Inger Andersen (*International*

*Union for the Conservation of Nature*) mewakili *Non-State Actors*; Republik Korea sebagai *Host Country*; dan Dr. Frank Rijsberman sebagai Direktur Jenderal (tanpa hak voting). Pada agenda ini juga disepakati jadwal sementara pelaksanaan *The 7<sup>th</sup> Session of the Assembly and The 11<sup>th</sup> Session of the Council* pada bulan Oktober 2018 di Seoul, Korea Selatan.

## **B. Pertemuan Bilateral dengan Direktur Jenderal GGGI**

Pertemuan bilateral antara Kementerian PPN/Bappenas sebagai *focal point* dengan Direktur Jenderal GGGI dilaksanakan pada hari Kamis, 19 Oktober 2017. Pertemuan ini membahas komitmen kontribusi RI yang akan berakhir tahun ini, kemajuan proses penyusunan *Host Country Agreement* (HCA) serta langkah-langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan, fokus dan pendekatan pelaksanaan program kerja sama *green growth* di Indonesia, peluang kerja sama antar negara anggota GGGI, dan rencana *engagement* dengan OECD dan inisiatif *New Climate Economy* (NCE).

1. Pada pertemuan ini, Dirjen GGGI menekankan pentingnya peran Indonesia di dalam organisasi GGGI baik dalam hal kontribusi maupun program. GGGI berkomitmen akan mengalokasikan pendanaan yang lebih fleksibel untuk program di Indonesia untuk periode mendatang. Dengan demikian, GGGI mengharapkan keberlanjutan kerja sama dengan Pemerintah RI baik dalam program pembangunan hijau maupun kontribusi finansial.
2. Pihak Kementerian PPN/Bappenas menekankan pentingnya bagi GGGI untuk fokus pada sektor atau kegiatan tertentu sehingga dalam waktu dekat dapat menunjukkan manfaat dan nilai tambah yang lebih konkrit. Hal ini penting sebagai masukan bagi Pemerintah RI dalam mereviu pelaksanaan kerja sama dengan GGGI. Disampaikan pula pentingnya pelibatan kementerian/lembaga secara aktif untuk meningkatkan *ownership* terhadap program kerja sama serta harapan agar GGGI dapat memainkan perannya dalam *leveraging* kerja sama pembangunan untuk membuka kesempatan pembiayaan pembangunan yang lebih luas melalui pelibatan pihak swasta. Hal lain yang harus tetap dilanjutkan adalah peningkatan kapasitas bagi pemerintah dalam melakukan pembangunan berwawasan hijau.

## **III. PENUTUP DAN TINDAK LANJUT**

Berdasarkan hasil pertemuan ini, terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan sebagai tindak lanjut sebagai berikut:

1. Kementerian PPN/Bappenas sebagai *focal point* perlu segera melakukan reviu terhadap kerja sama dengan GGGI sebagai dasar dalam menentukan berlanjut atau tidaknya kontribusi finansial RI kepada GGGI;
2. Mengakselerasi proses penyelesaian HCA, termasuk ratifikasinya;
3. Mereviu dokumen revisi *Reformed Work Program and Budget* yang akan disampaikan Sekretariat dan menyampaikan persetujuan secara tertulis paling lambat sebelum pertemuan MPSC pada bulan April 2018;
4. Menyampaikan pencalonan untuk anggota *Council GGGI* dari *Expert and Non-State Actors* dari Indonesia selambat-lambatnya pada akhir Desember 2017;
5. Melakukan konsolidasi pelaksanaan program *green growth* di Indonesia, terutama untuk memfokuskan kegiatan sesuai dengan *Country Planning Framework 2016-2020* dan *Green Growth Phase II Program Document*; dan
6. Jadwal sementara pelaksanaan *The 7<sup>th</sup> Session of the Assembly and The 11<sup>th</sup> Session of the Council* adalah pada bulan Oktober 2018 di Seoul, Korea Selatan.